

***DINAMIKA DE JAVASCHE BANK AGENTSCHAP SOERAKARTA 1950-1968***

***DYNAMIC DE JAVASCHE BANK AGENTSCHAP SOERAKARTA 1950-1968***

Oleh: Sekar Margiyanti, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, [sekarmargiyanti@gmail.com](mailto:sekarmargiyanti@gmail.com)

**Abstrak**

Wilayah Surakarta merupakan salah satu wilayah yang berperan dalam kemunculan perbankan di Indonesia. Adanya *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* yang berhasil dinasionalisasi telah memberikan pengaruh kepada masyarakat, yaitu memberikan pengetahuan pentingnya bank untuk keperluan keuangan. Kondisi kebijakan yang diterapkan pada *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebelum dinasionalisasi, *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda, begitupula kebijakan yang diterapkan harus diikuti oleh bank tersebut. Pasca kemerdekaan, *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* berubah nama menjadi Kantor Cabang Bank Indonesia Solo dan dijalankan oleh orang-orang Indonesia, khususnya masyarakat Solo. Adanya Kantor Cabang Bank Indonesia Solo memicu perkembangan kota Solo. Masyarakat Solo mulai banyak yang menyadari peran lembaga perbankan. Di bidang Sosial, peran yang menonjol dari Kantor Cabang Bank Indonesia Solo salah satunya ialah mensosialisasikan keberadaan dan fungsinya sebagai lembaga perbankan kepada masyarakat Solo. Dalam bidang ekonomi, peran yang penting adalah melakukan stabilisasi moneter, mengatur dan mengawasi kelancaran lalu lintas sistem pembayaran, khususnya di wilayah Solo. Adapun peran politik Kantor Cabang Bank Indonesia Solo, yaitu dengan mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kata kunci : *Dinamika, De Javasche Bank Agentschap Soerakarta, 1950-1968*

**Abstract**

*Surakarta is one of the regions that played a role in the emergence of banking in Indonesia in the emergence of banking in Indonesia. The existence of De Javasche Bank Agentschap Soerakarta which at the time of independence was successfully nationalized had given an influence to the community, namely to provide knowledge of the importance of banks for financial needs. The general situation of the rules that did in the development of Javasche Bank Agentschap Soerakarta is influenced by various factors, both before and after nationalization. After Indonesian independence, the De Javasche Bank Agentschap Soerakarta Office, which was one of the branch offices, changed its name to the Bank Indonesia Branch Office. The existence of the Bank Indonesia Solo Branch Office triggered the development of the city of Solo. People are starting to realize that banking institutions are also getting higher so that banking institutions also have a greater role in providing banking services to the public. In the economic field, the Bank Indonesia Solo Branch Office has a role to carry out monetary stabilization, regulate and supervise banks and maintain the smooth flow of payment systems, especially in the Solo area. The political role of De Javsche Bank is to support policies issued by the government.*

**Keywords:** *Dynamics, De Javasche Bank Agentschap Soerakarta, 1950-1968*

## Pendahuluan

*De Javasche Bank* (DJB) merupakan bank sirkulasi tertua di wilayah Asia, didirikan pada tahun 1828, setelah mendapatkan oktroi dari raja Willem I, Bank ini berusaha menjalankan tugasnya sebagai bank yang mengatur peredaran uang Hindia-Belanda. Pendirian *De Javasche Bank* juga dilakukan untuk menjalankan kegiatannya di Hindia Belanda. Empat tahun sebelum didirikannya *De Javasche Bank*, berdiri sebuah perusahaan dagang yang bernama *Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM). Perusahaan ini dibangun dengan modal yang sangat besar yaitu f37 juta. Modal sebesar itu digunakan untuk membiayai investasi di bidang perkebunan besar.

Selain untuk membiayai di bidang perkebunan, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan lembaga perbankan di Hindia Belanda, Raja William I, tanggal 29 Desember 1862 mengeluarkan surat perintah yang isinya adalah persiapan pendirian sebuah lembaga perbankan di Hindia Belanda yang kemudian diberi nama *De Javasche Bank*. Pendirian lembaga perbankan dilakukan karena kebutuhan dari kerajaan Belanda dan pemerintah Kolonial Belanda, dan juga pedagang-pedagang di Hindia Belanda dalam menjalankan roda perekonomian serta untuk mengisi kas kerajaan dan memenuhi kekurangan persediaan mata uang yang beredar.

Menjelang abad ke-20 seluruh Hindia-Belanda, *De Javasche Bank* baru mempunyai 7 kantor cabang yaitu Semarang (1829), Surabaya (1829), Padang (1864), Makassar (1864), Cirebon (1866), Solo (1867), Yogyakarta (1829). Pembukaan kantor cabang ketiga dari *De Javasche Bank* cabang Padang pada 29 Agustus 1864 membuat pembukaan kantor cabang di daerah-daerah lainnya di Nusantara semakin ditingkatkan. 21 Desember

1864 kemudian *De Javasche Bank* Makassar resmi di buka, pembukaan kantor cabang Padang dan Makassar ini adalah pembukaan kantor cabang pertama di luar Pulau Jawa Jawa.

Alasan kegiatan ekonomi dan perputaran uang yang terjadi di Solo dipastikan menjadi hal utama pendirian *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta*. Banyaknya perkebunan-perkebunan yang berdiri, baik itu milik perusahaan swasta maupun milik Keraton, berkembangnya perdagangan batik, mudahnya jalur transportasi dengan dibuatnya jalur kereta api ke Semarang, dan berbagai faktor penunjang lainnya, semakin mengukuhkan alasan pendirian kantor cabang oleh *De Javasche Bank* di Solo. Sejarah Bank Indonesia mencakup masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai Dekrit Presiden 5 Juli 1959.<sup>1</sup> Upaya pembentukan Bank Indonesia, yaitu dengan bermulanya pembentukan Jajasan Poesat Bank Indonesia pada tahun 1946, nasionalisasi *De Javasche Bank* (DJB) pada tahun 1951, dan berakhir dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 11 tahun 1953 tentang Undang-undang Pokok Bank Indonesia.<sup>2</sup>

*De Javasche Bank Agentchap Soerakarta* pada masa revolusi juga baru bisa dibuka pada akhir tahun 1948. Tahun 1951, *DeJavasche Bank* dinasionalisasi oleh pemerintah

<sup>1</sup>Departemen Museum Bank Indonesia, *Sejarah dan heritage Kantor perwakilan Bank Indonesia di Solo*, (Jakarta : Bank Indonesia, 2014), hlm. 4.

<sup>2</sup>Sejarah Bank Indonesia Periode I : 1945-1959, *Bank Indonesia Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, (Jakarta : Bank Indonesia, 2005), hlm. 1-2.

Indonesia. Dua Tahun kemudian *De Javasche Bank* Agentschap Soerakarta, menjadi Kantor Bank Indonesia cabang Solo.<sup>3</sup> Bank Indonesia juga masih melanjutkan dan mewarisi sebagian kecil fungsi dan peranan *De Javasche Bank* sebagai bank umum, dan bank devisa. Bank sentral, dalam pengertian umum adalah sebuah lembaga yang disertai tugas untuk mengontrol sistem keuangan dan perbankan. Guna menjalankan peranannya itu, bank sentral umumnya diberi monopoli untuk mengeluarkan uang dan wewenang prerogatif untuk mengatur jumlah uang beredar. Bank sentral juga diberi fungsi dan wewenang untuk membina dan mengawasi kegiatan perbankan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*).<sup>4</sup>

Dalam menjalankan fungsinya bank sentral mempunyai peranan khusus dalam sistem moneter. Fungsinya ialah sebagai sumber peminjaman bagi bank-bank (*the bankers bank*) dan sumber terakhir bagi bank-bank untuk mendapatkan pinjaman ketika bank yang bersangkutan sedang mengalami kesulitan *likuiditas* (*lender of the last resort*). Dalam fungsinya ini bank sentral sekaligus juga berperan dalam mengembangkan sistem perkreditan yang sehat.<sup>5</sup> Nasionalisasi *De Javasche Bank* tidak hanya dimaksudkan sebagai pengambilalihan kepemilikan dan manajemen, melainkan juga untuk mengubah dan mengisinya dengan muatan tujuan dan misi yang sejalan dengan aspirasi pembangunan nasional.

Secara ringkas bank Indonesia,

---

<sup>3</sup>Departemen Museum Bank Indonesia, *loc.cit.*

<sup>4</sup>Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959, *op. cit.*, hlm. 5-6.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm.20.

seperti ditunjukkan oleh perjalanan sejarahnya, memiliki ciri-ciri yang berbeda, baik dari lembaga-lembaga serupa di negara-negara maju, maupun dengan rekan-rekannya diantara sesama negara sedang berkembang.<sup>6</sup> Sejarah pendirian kantor cabang *De Javasche Bank* yang kemudian menjadi Bank Indonesia sebagai sudut pandang utama. Sementara itu *De Javesche Bank* Agentschap Soerakarta yang sekarang telah menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo. Kegiatan ekonomi dan perputaran uang yang terjadi di Solo merupakan hal utama yang menjadi pendirian *De Javasche Bank* Agentschap Soerakarta. Pada masa revolusi, Perdana Menteri Sutan Sjahrir beserta kabinetnya membahas revolusi di Soerakarta bersama dengan Sri Susuhunan Pakubuwono XII dan Sri Mangkoenogoro VIII. Kantor *De Javasche Bank* Agentschap Soerakarta yang pernah ditutup pada masa pendudukan Jepang pun juga tidak luput dari pembahasan. Pasca masa revolusi, Bank Indonesia Soerakarta dibuka kembali dan akhirnya menjadi bagian dari nasionalisasi *De Javasche Bank* dan menjadi Bank Indonesia Cabang Surakarta pada tahun 1951. Tujuan tulisan ini guna mengetahui kondisi *De Javasche Bank* Agentschap Soerakarta sebelum dinasionalisasi. Adapun tujuan selanjutnya ialah untuk mengetahui dinamika *De Javasche Bank* Agentschap Soerakarta tahun 1950-1968. Selain itu, untuk mengetahui pula peran *De Javasche Bank* Agentschap Soerakarta dalam bidang politik, sosial dan ekonomi.

---

<sup>6</sup>Tim penulis LP3ES, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), hlm. 7.

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah prosedur dasar penyelidikan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mengumpulkan bahan sehingga mendapatkan bahan selengkapnya agar dapat memecahkan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian Sejarah Memiliki langkah-langkah penelitian yang disebut Metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan.<sup>7</sup>Di dalam metodologi sejarah terdapat empat tahapan kerja yaitu: heuristik (pengumpulan data), kritik sumber (kritik internal dan eksternal), interpretasi (penafsiran), historiografi (penulisan).<sup>8</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Sejarah *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta*

Pada tahun 1824, empat tahun sebelum berdirinya *De Javasche Bank*, berdiri sebuah perusahaan dagang yang bernama *Nederlandsche Handel-Maatschappij* (NHM). Perusahaan ini dibangun dengan modal yang ukurannya sangat besar pada saat itu, f37 juta. Dengan modal sebesar itu NHM juga bertindak sebagai bank, terutama untuk membiayai investasi di bidang

perkebunan besar. Maksud dari bertindak sebagai bank di sini ialah NHM merupakan perusahaan yang dapat berinvestasi atau memberikan modal kepada perusahaan lain supaya mendapatkan keuntungan.

Pendirian *De Javasche Bank* pada tahun 1828 merupakan titik tolak dari perkembangan sejarah bank sentral di Nusantara. Ketika didirikan, belum ada bank sirkulasi di Asia selain bank tersebut. Hal ini benar-benar menunjukkan betapa pentingnya *De Javasche Bank*. Perkembangan-perkembangan ekonomi yang terjadi di Hindia Belanda menyebabkan *De Javasche Bank* harus terus melakukan perubahan dalam menerapkan berbagai kebijakannya. Hal ini menjadi acuan bagaimana lembaga bank dapat berjalan dengan baik dari masa ke masa.<sup>9</sup>*De Javasche Bank* merupakan bank swasta pertama yang didirikan di Hindia Belanda, yaitu pada 24 Januari 1828. Didasari oleh surat kuasa No. 85 dari raja Willem I bertanggal 29 Desember 1826. Modal *De Javasche Bank* sendiri jauh lebih kecil dari NHM, hanya f4 juta, yang terbagi dalam 8000 saham masing-masing bernilai f500.

Pembentukan *De Javasche Bank* dilakukan oleh Komisaris Jenderal Hindia Belanda, Leonard Pierrere Joseph Burgraaf Du Bus de Gisiegnis yang mengeluarkan oktroi sebagai undang-undang untuk bank tersebut pada tanggal 11 Desember 1827. Pada 7 Maret 1828, *De Javasche Bank* menyewa sebuah gedung bekas rumah sakit di kawasan dalam tembok kastil Batavia yang dikenal dengan sebutan *Binnen Hospital* (rumah sakit dalam kastil). Gedung tersebut disewa dengan biaya sewa f500per bulan dan baru pada

---

<sup>7</sup>Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 43-44.

<sup>8</sup>Rahmad Hamid dan Muhamad Saleh, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 43.

---

<sup>9</sup>Dawam Rahardjo, *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm.23-30.

20 April 1830 gedung itu dibeli oleh *De Javasche Bank* seharga f45.000.<sup>10</sup>

Pada awalnya, aspek utama kegiatan *De Javasche Bank* terdiri atas kegiatan diskonto surat berharga (*promissory notes*) yang dikeluarkan oleh pembeli barang impor sesuai dengan permintaan importer. Hingga tahun 1850-an, *De Javasche Bank* masih merupakan satu-satunya lembaga bank yang memberikan kredit kepada pedagang yang terkait kebijakan *cultuurstelsel*. Meskipun dengan kekuatan modalnya memungkinkan *De Javasche Bank* untuk mempunyai peranan penting dalam perkreditan dalam jumlah besar, ditambah dengan hak untuk mengedarkan uang kertasnya sendiri, namun *De Javasche Bank* belum dapat dikatakan sebagai bank sentral untuk Hindia Belanda. Melihat peranannya pada periode ini, *De Javasche Bank* hanya sekedar mengurus administrasi transfer dari lembaga moneter Belanda ke Hindia Belanda dan tidak bertindak lebih dari sebagai perantara dalam arus uang.

Memasuki abad ke-20, *De Javasche Bank* masih bertahan sebagai bank sirkulasi untuk Hindia Belanda, bahkan kantor cabangnya semakin bertambah luas, menyebar ke beberapa wilayah Hindia Belanda. Tahun 1922, pemerintah mengganti landasan hukum *De Javasche Bank* yang sebelumnya berupa oktroi diganti dengan undang-undang. Perubahan ini ditandai dengan diberlakukannya *De Javasche Bank Wet* (*DJB Wet*) pada tanggal 31 Maret 1922. Sejak berlakunya *DJB Wet*, *De Javasche Bank* memperoleh wewenang dari pemerintah Hindia Belanda yang hanya dapat dilakukan oleh suatu bank sentral. Meski demikian, undang-undang

tidak jauh berbeda dengan oktroi yang berlaku sebelumnya, yaitu masih menetapkan *De Javasche Bank* sebagai bank sirkulasi sekaligus bank komersial di Hindia Belanda.<sup>11</sup> *De Javasche Bank* memiliki catatan yang panjang dalam perkembangan sejarah perekonomian dan perbankan di Indonesia. Meski sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, *De Javasche Bank* dapat dibuka kembali dan menjalankan tugasnya sebagai bank sirkulasi.

Latar belakang berdirinya *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* tidak lepas dari kondisi Solo terutama dari aspek ekonomi yang semakin lama semakin berkembang. *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* didirikan pada tanggal 25 November 1867. Pendirian kantor ini merupakan sebuah perubahan pola kedua yang dilakukan oleh *De Javasche Bank*. Setelah sebelumnya mendirikan kantor cabang di wilayah luar pulau Jawa dan tetap konsisten mendirikan kantor cabang yang berada di kota-kota pelabuhan, *De Javasche Bank* kemudian memilih Solo yang berada di pedalaman Pulau Jawa. Adanya Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran yang membuat perekonomian Surakarta bergerak dinamis menjadi salah satu alasan penyebab didirikannya kantor cabang *De Javasche Bank* di Surakarta. Berdirinya perkebunan-perkebunan di wilayah *Vorstenladen* membuat jumlah tanah yang disewakan semakin dinamis.

Perkembangan kota Solo yang pesat juga tidak bisa lepas dari peranan beberapa orang Eropa yang menanamkan modalnya di Solo. Orang-orang Eropa tersebut juga membangun

<sup>10</sup>Erwien Kusuma, *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2014), hlm. 14-17.

<sup>11</sup>Grup Riset Kebanksentralan, *Sejarah dan Heritage Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo*, Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral, 2014, hlm. 14-15.

infrastruktur – infrastruktur di Solo.<sup>12</sup> Pembangunan jalur dan stasiun kereta api serta trem, pendirian *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta*, dan lain sebagainya menjadi bagian dari usaha orang-orang Eropa untuk kelancaran usaha mereka. Salah satu peneliti masa kolonial, J.M. Roosenschoon, memberikan pendapat bahwa pemasukan perintah kolonial melalui perekonomian di Jawa pada periode sistem tanam Paksa sama sekali tidak mendapatkan pengaruh dari perkembangan perkebunan swasta di Jawa.

Kantor cabang *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* resmi didirikan pada tanggal 25 November 1867 oleh A.W. Verkouteren yang juga sebagai pemimpin kantor cabang yang pertama.<sup>13</sup> Pasca berdirinya, *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* banyak menghadapi berbagai krisis, salah satunya ialah krisis gula tahun 1840. Pada periode tahun 1880 sampai awal tahun 1900, banyak bermunculan bank-bank asing non-Belanda yang ikut meramaikan kegiatan perbankan di Hindia Belanda, hal ini membuat persaingan *De Javasche Bank* dengan bank-bank asing non-Belanda menjadi semakin ketat.<sup>14</sup>

Pada tahun 1915-1922, kondisi perekonomian di Solo memburuk. Masyarakat Solo yang notabene berupah sangat minim, kemudian pada tahun tersebut masyarakat Solo malah tertimpa

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

<sup>13</sup>Arsip Mangkunegaran tentang Pemberitahuan Berdirinya *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* kepada KGPAA Mangkoenegoro VIII.

<sup>14</sup>Dawam Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 42.

musibah di mana banyak orang-orang yang terserang penyakit pes. Hal ini berdampak kepada *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* karena masyarakat Soloyang sedang terkena wabah pes menjadi tidak dapat membayar pinjamannya kepada *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta*, padahal dalam situasi ini *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* sedang berusaha menjaga kestabilan ekonomi Hindia Belanda.<sup>15</sup> Adapun cara *De Javasche Bank*, termasuk *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* untuk menarik hati masyarakat supaya mau meminjam uang, salah satunya dengan mencetak uang seri wayang.

Selama paruh waktu pertama abad ke-20, *De javasche Bank* di seluruh Hindia Belanda berusaha untuk menyetabilkan perekonomian di Hindia Belanda, termasuk *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta*. Tetapi sebelum perekonomian di Hindia Belanda tertata rapi, pada tahun 1942 Hindia Belanda berhasil direbut oleh Jepang. Segera setelah menguasai Hindia Belanda, pada 11 April 1942 pemerintah Jepang segera melikuidasi semua lembaga keuangan milik Eropa, termasuk *De Javasche Bank*. Selain itu, pemerintah Jepang kemudian mendirikan Nanpo Kaihatsu Ginko yang bertugas mengatur keuangan Jepang pada tahun 1943. Tugas dari Nanpo Kaihatsu Ginko ini adalah sebagai bank sikulasi menggantikan *De Javasche Bank*. Tugas lainnya yaitu untuk mensupervisi lembaga perbankan lain di Hindia Belanda. Tahun 1945, kekalahan Jepang atas Sekutu berimbas pada Indonesia. Indonesia berpeluang untuk memerdekakan diri.

---

<sup>15</sup>George D. Larsson, *Masa Menjelang Revolusi, Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*, (Yogyakarta: UGM Press, 1990), hlm. 190-194.

Pasca kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia memasuki babak baru dalam berbagai bidang kehidupan bernegara. Hal ini juga terjadi di wilayah Solo. Keputusan-keputusan politik terkait dengan lahirnya Republik Indonesia harus segera dilakukan oleh kedua kerajaan yang berada di wilayah yang dekat dengan sungai Bengawan Solo tersebut. Pada periode 1945-1949, Indonesia memasuki masa revolusi fisik. Masa revolusi fisik terjadi disebabkan oleh Bangsa Belanda yang menunggangi NICA ingin menguasai Indonesia kembali.<sup>16</sup>

Masa revolusi yang terjadi di Surakarta merupakan masa pergolakan sebab Surakarta menjadi pusat kegiatan komunis (PKI), perang antar kelas, penculikan, dan kekacauan umum yang merambah ke bagian-bagian yang lain di Jawa dan mempengaruhi jalannya revolusi Indonesia.<sup>17</sup> Pasca proklamasi, pemerintahan pusat mengumumkan bahwa pemerintahan Surakarta berada di bawahnya. Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) kemudian dibentuk di Surakarta pada September 1945, diketuai oleh K.P.H. Mr. Sumodiningrat dan dibantu oleh 9 orang lainnya.

Tahun 1947, NICA melanggar perundingan Linggarjati dan melakukan serangan secara terang-terangan ke Indonesia yang disebut Agresi Militer Belanda I. Agresi Militer I bertujuan untuk menguasai daerah-daerah perkebunan yang kaya dan yang memiliki sumber daya alam. Agresi Militer I ini membuat sejumlah daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dikontrol ketat, bahkan sering diblokade,

---

<sup>16</sup>Soedarism

Poerwokoesoemo, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: UGM Press, 1984), hlm. 23.

<sup>17</sup>Grup Riset  
Kebanksentralan, *op. cit.*, hlm 70.

sehingga kekuatan ekonomi nyaris lumpuh.

Dalam kurun waktu 1945-1949, *De Javasche Bank* secara bertahap melakukan pembukaan kembali kantor-kantor cabangnya di Indonesia. Pertama, *De Javasche Bank* membuka kantor pusatnya yang berada di Jakarta pada Maret 1946, kemudian disusul dengan kantor cabang Semarang, Manado, Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Bandung, dan Semarang. Pada Juli 1947, *De Javasche Bank* membuka kantor cabang yang lainnya, seperti kantor cabang Palembang, Cirebon, Malang, dan Padang, kemudian pada Desember 1948 dilakukan pembukaan kantor cabang yang berada di Yogyakarta, Surakarta dan Kediri.<sup>18</sup> Dibukanya kembali *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta*, mulai membantu mengangkat perekonomian dan sirkulasi uang yang berada di Surakarta. Ini dapat terjadi karena *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* sedikit dapat mengendalikan laju inflasi yang sedang melambung. Selain itu, peredaran uang yang tadinya tidak berjalan dengan baik, bahkan sempat menggunakan ORIDA berupa Bon sebagai alat pembayaran, hal tersebut selanjutnya mulai berkurang dan mulai dapat menggunakan ORI dan uang *De Javasche Bank* sebagai alat transaksi di wilayah Surakarta hingga nantinya ORI ditarik dari peredaran.

## **B. Perkembangan *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta***

Kota Surakarta atau Solo merupakan kota terbesar ketiga di pulau Jawa bagian Selatan setelah Bandung dan Malang menurut jumlah penduduknya, sisi timur kota ini di lewati Sungai terpanjang di Jawa yaitu

---

<sup>18</sup>Grup Riset  
Kebanksentralan, *op. cit.*, hlm. 89-90.

Bengawan Solo. Surakarta merupakan pewaris Kasultanan Mataram yang terpecah melalui Perjanjian Giyanti. Wilayah Surakarta memiliki luas wilayah sebesar 3.288,23 Km<sup>2</sup>. Karesidenan Surakarta terdiri dari daerah-daerah Kota Praja Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali.. Pasca kemerdekaan, Karesidenan Surakarta dihapuskan pada tanggal 4 Juli 1950, setelah itu Surakarta menjadi kota di bawah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Semenjak berlakunya UUPemerintahan Daerah yang memberikan banyak hak otonomi bagi pemerintahan daerah, Surakarta menjadi daerah berstatus kota otonom.<sup>19</sup>Surakarta menjadi salah satu kota terpenting di Jawa Tengah, hal ini dikarenakan pada kota tersebut pertumbuhan ekonominya sangat baik.

Periode awal tahun 1950-an merupakan suatu masa konsolidasi.. Negara Republik Inodnesia Serikat yang berdiri pada 27 Desember 1949 dengan adanya Konferensi Meja Bundar tidak dapat bertahan lama.Konferensi Meja Bundar juga menghasilkan Persetujuan Keuangan dan Perekonomian.Perkembangan ekonomi pada masa konsolidasi politik dipengaruhi oleh kejadian-kejadian dan tujuan-tujuan politik. Konsolidasi politik menitikberatkan pada unsur nasional, salah satu tujuan di bidang ekonomi adalah untuk mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Pemerintah memberi kesempatan yang lebih besar kepada pengusaha nasional

untuk bergerak di bidang ekonomi. Hal ini ditanggapi oleh masyarakat dengan mulai banyaknya pengusaha lokal yang mendirikan usahanya untuk memperkuat ekonomi nasional.<sup>20</sup>

Struktur ekonomi Indonesia pada zaman pendudukan Belanda adalah ekonomi kolonial dalam bentuk ekonomi agraris. Pengertian ekonomi kolonial dan ekonomi nasional lebih mengacu pada siapa yang memegang kekuasaan dan peranan utama dalam penyelenggaraan aktivitas ekonomi. Pada struktur ekonomi kolonial, Bangsa Belanda dan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan mereka adalah pemegang peranan yang penting karena dapat mengakses dan mengetahui lebih detail pola yang diterapkan oleh pemerintah.

Selama kurun waktu 1954-1958, terlihat perbedaan besar antara bank umum swasta dengan golongan bank asing dalam perbankan Indonesia. Perbedaan tersebut terlihat pada kekuatan modal, lingkungan kerja, “banking standards”, dan efisiensinya.

Sejak berakhirnya masa revolusi fisik, Indonesia mulai menggunakan sistem pemerintahan Demokrasi Liberal. Pada masa ini, pemerintah Indonesia melihat peranan penting dari sebuah bank sentral bagi suatu negara dalam bidang ekonomi, kemudian muncul keinginan untuk menasionalisasi bank asing dan keinginan tersebut terwujud pada 30 April 1951.Keberhasilan pemerintah Indonesia membeli 97% saham *De Javasche Bank*, membuat pemerintah Indonesia sesegera mungkin mengambil langkah berikutnya. Pada bulan September 1952, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia kepada parlemen, dan disetujui pada 10 April 1953 serta disahkan oleh presiden

---

<sup>19</sup>Grup Riset Kebanksentralan, *Sejarah dan Heritage Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo*, (Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral, 2014), hlm. 19-20.

---

<sup>20</sup>Oey Beng To, *op. cit.*, hlm. 117-118.



tanggal 29 Mei 1953 sebagai UU No. 11 tahun 1953 ihwal Pokok Bank Indonesia, dan mulai berlaku sejak 1 Juli 1953. Sejak saat itu Indonesia memiliki sebuah lembaga bank sentral dengan nama Bank Indonesia. Berkat nasionalisasi tersebut, *De Javasche Bank* secara resmi berganti nama menjadi Bank Indonesia serta menjadi bank sirkulasi milik pemerintah Indonesia dan bukan lagi bank swasta milik Belanda (selanjutnya disebut Bank Indonesia).<sup>21</sup>

Dengan demikian, Bank Indonesia juga diperkenankan membuka kantor di wilayah-wilayah yang dianggap membutuhkan perwakilan bank sentral. Pendirian kantor cabang berdasar kepada pasal 3 UU No. 11 tahun 1953 ihwal Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia.<sup>22</sup> Kantor-kantor cabang warisan dari *De Javasche Bank* pun kemudian menjadi kantor cabang dari Bank Indonesia. *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* yang merupakan salah satu kantor cabang itu pun berubah nama menjadi Kantor Cabang Bank Indonesia Solo (selanjutnya disebut Kantor Cabang Bank Indonesia Solo). Kepala *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* ketika masa proses nasionalisasi (1951) ialah C.I. Van Zuylen dan setelah dinasionalisasi (1953) pimpinan Cabang Solo ialah Indol D. Kruys, kemudian orang Indonesia pertama yang menjadi pimpinan Kantor Cabang Bank

Indonesia Solo ialah R. Dhoemadi Singowigoeno yang menjabat pada tahun 1957.

Bergantinya sistem pemerintahan dari orde lama ke orde baru membawa perubahan di berbagai bidang, termasuk dalam bidang perbankan. Pada masa orde baru, sejak 1966 dilakukan upaya untuk mengembalikan tugas dan fungsi dari bank sentral dan bank umum/komersial.<sup>23</sup> Sistem Bank Tunggal yang diterapkan pada masa orde lama pun berakhir pada 31 Desember 1968 dan unit-unit yang tergabung dalam Bank Tunggal kembali berdiri sendiri menjadi badan hukum sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya.

### C. Peran *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta*

Pasca nasionalisasi, lembaga perbankan *De Javasche Bank* diubah namanya menjadi Bank Indonesia sehingga secara otomatis kantor-kantor cabang *De Javasche Bank* juga mengalami pergantian nama. Salah satunya adalah *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* menjadi Kantor Cabang Bank Indonesia Solo.<sup>24</sup> Walaupun sudah di nasionalisasi, pimpinan Kantor Cabang Bank Indonesia Solo pada tahun 1951 dan 1953 masih dipegang oleh tenaga ahli asing. Baru pada tahun 1957, tampu kepemimpinan kantor cabang dipegang oleh putera Indonesia.

Kantor *De Javasche Bank*

<sup>21</sup>Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia Periode 3 1966-1983: Bank Indonesia Pada Masa Stabilisasi, Rehabilitasi, dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2006), hlm. 29-32.

<sup>22</sup>Grup Riset Kebanksentralan, *op. cit.*, hlm. 93.

<sup>23</sup>Grup Riset Kebanksentralan, *op. cit.*, hlm. 97-98.

<sup>24</sup>Grup Riset Kebanksentralan, *Sejarah dan Heritage Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2014), hlm. 93.

*Agentschap Soerakarta* merupakan salah satu kantor cabang yang didirikan di daerah pedalaman pulau Jawa. Hal ini disebabkan adanya dua kerajaan yang membuat perekonomian di wilayah Surakarta mengalami pergerakan yang dinamis. Secara umum, setelah *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* di nasionalisasi, fungsi utamanya tetap sebagai agen pembangunan dan alat untuk sirkulasi uang.<sup>25</sup> Adapun fungsi atau peran lainnya, salah satunya dalam bidang sosial, seperti meningkatkan sumber daya manusia di wilayah Solo itu sendiri. Dinasionalisasinya *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* membuat semua pengelola bank tersebut juga dirombak total.

Pada bagian selanjutnya, peran dalam bidang sosial yang lain salah satunya ialah menyejahterakan masyarakat. Bank yang sebelumnya hanya boleh digunakan oleh orang-orang yang memiliki derajat tinggi ini, kemudian mulai dapat digapai oleh semua lapisan masyarakat. Masyarakat Solo rendah yang dulunya tidak dapat menabung atau menyimpan uangnya di bank cabang Solo ini, setelah dinasionalisasi mereka mulai dapat menabung di bank tersebut. *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* juga menyediakan perkreditan untuk masyarakat menengah ke bawah, di mana perkreditan ini cukup membantu masyarakat kecil di Solo untuk membangun usahanya. Sebagai sebuah bank, *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* juga membantu masyarakat Solo untuk menyimpan dan menjaga uangnya supaya tetap aman dari berbagai hal yang tidak diinginkan, seperti pencurian atau perampokan.<sup>26</sup> Ketika terjadi inflasi pada periode 1950-an, *De Javasche Bank Agentschap*

*Soerakarta* juga berperan membantu masyarakat atau khususnya nasabahnya untuk meyakinkan bahwa selama inflasi bank tersebut akan tetap berusaha melaksanakan tugasnya sebagai alat penyimpanan uang yang stabil.<sup>27</sup>

Selama periode 1950-an, struktur ekonomi Indonesia masih mengikuti bentuk peninggalan masa kolonial. Kegiatan ekonomi pun dapat dikatakan memang masih sangat minim, perusahaan-perusahaan saat itu juga bekas peninggalan kolonial yang mayoritas masih milik orang asing, di mana produk-produk yang dihasilkan masih berorientasi pada ekspor. Pada tahun 1951, saham *De Javasche Bank* berhasil dimiliki oleh Indonesia sebesar 99,4%. Kemudian pada tahun 1953, *De Javasche Bank* diganti menjadi Bank Indonesia, begitupula *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* yang berubah nama menjadi Kantor Cabang Bank Indonesia Solo. Bank Indonesia sendiri mempunyai tugas dan fungsi seperti *De Javasche Bank* yang merupakan bank sentral dan bank sirkulasi. Peran Bank Indonesia sangat penting bagi perekonomian Indonesia sehingga Bank Indonesia diperbolehkan untuk membuka kantor cabang diseluruh Indonesia.

Di sisi lain, peran *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* dalam perekonomian Indonesia ialah dalam bidang usaha. Demi menerapkan sistem ekonomi nasional, *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* memberikan akses dengan menyediakan pinjaman dana untuk para pengusaha besar di Solo. Hal ini sangat membantu para pengusaha di Solo untuk memperbesar industrinya. Adapula ketika mereka membutuhkan untuk menjual sahamnya,

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 287.

---

<sup>27</sup>Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945-1958)*, (Jakarta: LPPI, 1991), hlm. 115.

para pengusaha tersebut juga dapat menjualnya ke Bank Indonesia Cabang Solo ini. Pada periode 1950-an, ketika terjadi inflasi, *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* berperan dan berusaha untuk menjaga stabilitas perekonomian di Solo supaya tidak terjadi lonjakan yang semakin parah dengan cara menekan peredaran uang dan laju inflasi tersebut.<sup>28</sup>

Pergolakan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal disebabkan karena struktur pemerintahan Indonesia belum stabil. Selain itu, ketidakstabilan politik pada masa ini juga dipengaruhi oleh sering bergantinya kabinet di parlemen. Ketidakstabilan politik pemerintah tentu memberikan pengaruh dalam bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pada kurun waktu 1950-1966 didasarkan pada keadaan politik saat itu. Hal ini dapat dilihat dari nasionalisasi lembaga-lembaga dan perusahaan milik kolonial, seperti nasionalisasi *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta*.<sup>29</sup> Pasca *De Javasche bank Agentschap Soerakarta* dinasionalisasi, peran utama dalam bidang politik ialah mendukung serta menjalankan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia.

Ketika terjadi inflasi pada tahun 1950-an, kebijakan politik pemerintah pun berubah-ubah tergantung kabinetnya, sehingga perbankan di Indonesia juga harus mengikuti, menyesuaikan dan menjalankan perubahan-perubahan kebijakan tersebut. Pada masa demokrasi terpimpin pula bank-bank berfungsi dan berperan sebagai alat revolusi yang berarti sebagai alat pemerintah, semua bank diarahkan menjadi semacam bank pembangunan yang mendanai proyek-proyek pemerintah, seperti proyek besar

politik mercusuar. Demikian halnya dengan *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* yang dinasionalisasi dan dibentuk di bawah pengawasan Bank Sentral agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai alat sirkulasi.<sup>30</sup>

### Kesimpulan

Dalam kurun waktu 1945-1949, *De Javasche Bank* secara bertahap melakukan pembukaan kembali kantor-kantor cabangnya di Indonesia. Dibukanya kembali *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta*, mulai membantu mengangkat perekonomian dan sirkulasi uang yang berada di Surakarta. Ini dapat terjadi karena *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* sedikit dapat mengendalikan laju inflasi yang sedang melambung. Selain itu, peredaran uang yang tadinya tidak berjalan dengan baik, bahkan sempat menggunakan ORIDA berupa Bon sebagai alat pembayaran, hal tersebut selanjutnya mulai berkurang dan mulai dapat menggunakan ORI dan uang *De Javasche Bank* sebagai alat transaksi di wilayah Surakarta hingga nantinya ORI ditarik dari peredaran.

Sejak berakhirnya masa revolusi fisik, Indonesia mulai menggunakan sistem pemerintahan Demokrasi Liberal. Pada masa ini, pemerintah Indonesia melihat peranan penting dari sebuah bank sentral bagi suatu negara dalam bidang ekonomi, kemudian muncul keinginan untuk menasionalisasi bank asing dan keinginan tersebut terwujud pada 30 April 1951. Berawal dari pengumuman yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Mr. Jusuf Wibisono bahwa pemerintah Indonesia hendak menasionalisasi *De Javasche Bank*. Pada 19 Juni 1951, dibentuk suatu panitia untuk mengurus ihwal nasionalisasi, panitia ini bernama Nasionalisasi *De Javasche Bank*.

<sup>28</sup>Oey Beng To, *loc. cit.*

<sup>29</sup>M.C. Ricklefs, *loc. cit.*

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 403.

Kantor-kantor cabang warisan dari *De Javasche Bank* pun kemudian menjadi kantor cabang dari Bank Indonesia. *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* yang merupakan salah satu kantor cabang itu pun berubah nama menjadi Kantor Cabang Bank Indonesia Solo (selanjutnya disebut Kantor Cabang Bank Indonesia Solo). Kepala *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* ketika masa proses nasionalisasi (1951) ialah C.I. Van Zuylen dan setelah dinasionalisasi (1953) pimpinan Cabang Solo ialah Indol D. Kruys, kemudian orang Indonesia pertama yang menjadi pimpinan Kantor Cabang Bank Indonesia Solo ialah R. Dhoemadi Singowigoeno yang menjabat pada tahun 1957. Layaknya kantor cabang Bank Indonesia lainnya, pada dasarnya Kantor Cabang Bank Indonesia Solo berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diemban oleh Bank Indonesia, dan melaksanakan hubungan kerja dengan pihak-pihak lain yang terkait, terutama di wilayah kerjanya masing-masing.

Berdirinya *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* dan perusahaan-perusahaan memicu perkembangan kota Solo. Selain itu dengan perkembangan kota tersebut, masyarakat mulai menyadari lembaga perbankan juga semakin tinggi sehingga lembaga perbankan semakin besar pula peranan dalam memberikan jasa perbankan kepada masyarakat, karena pada masa kemerdekaan ini masyarakat dari kalangan apapun dapat melakukan transaksi perbankan. Disamping itu, *Agentschap* yang berkedudukan sebagai perwakilan dari *De Javasche Bank* memiliki peran untuk mengamankan harta dan kekayaan para nasabahnya dari bahaya, seperti pencurian dan perampokan.

Pada tahun 1951, saham *De Javasche Bank* berhasil dimiliki oleh Indonesia sebesar 99,4%. Kemudian

pada tahun 1953, *De Javasche Bank* diganti menjadi Bank Indonesia, begitupula *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta*. Bank Indonesia Cabang Surakarta sendiri mempunyai tugas dan fungsi seperti *De Javasche Bank* yang merupakan bank sentral dan bank sirkulasi. Peran Bank Indonesia Cabang Surakarta sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada umumnya dan bagi masyarakat Solo pada khususnya. Hal ini bertujuan agar tugas dan peran Bank Indonesia Cabang Surakarta dalam melakukan stabilisasi moneter, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjaga kelancaran lalu lintas sistem pembayaran.

Selain itu, peran politik *De Javsche Bank Agentschap Soerakarta* yaitu dengan mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan mendukung kebijakan pemerintah, maka Kantor Bank Indonesia Cabang Suerakarta telah pembangunan negara yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah. Pada masa demokrasi terpimpin, bank-bank berfungsi dan berperan sebagai alat revolusi yang berarti sebagai alat pemerintah, semua bank diarahkan menjadi semacam bank pembangunan yang mendanai proyek-proyek pemerintah, seperti proyek besar politik mercusuar. Demikian halnya dengan *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* yang dinasionalisasi dan dibentuk di bawah pengawasan Bank Sentral agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai alat sirkulasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Arsip:  
Arsip Pemberitahuan Berdirinya *De Javasche Bank Agentschap Soerakarta* kepada KGPAA Mangkoenegoro VIII.

Buku:

- Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia Periode 1 1945-1959: Bank Indonesia Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2005.
- Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia Periode 3 1966-1983: Bank Indonesia Pada Masa Stabilisasi, Rehabilitasi, dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2006.
- Dawam Rahardjo, *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Departemen Museum Bank Indonesia, *Sejarah dan heritage Kantor perwakilan Bank Indonesia di Solo*, Jakarta : Bank Indonesia, 2014.
- Erwin Kusuma, *Dari De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2014.
- Grup Riset Kebanksentralan, *Sejarah dan Heritage Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo*, Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral, 2014.
- Larsson, George D., *Masa Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.
- Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia: Jilid (1945-1958)*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), TT.
- Rahmad Hamid dan Muhamad Saleh, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta: Serambi, 2008.
- Soedarisman Poerwokoesoemo, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: UGM Press, 1984.

Yogyakarta, Desember 2019

Dosen Pembimbing TAS

Dr, Miftahuddin, M.Hum.  
NIP. 197403022003121006

Reviewer

Ririn Darini, M. Hum  
NIP. 197411181999032001